PERTEMUAN I
KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK

1. Ruang Lingkup Sektor Publik

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, mem-perhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilaku-kan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.

Sektor publik adalah birokrasi dan kesatuan ekonomi yang ditanganioleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalamrangka memerankan fungsinya untuk:

1. alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka
2. pengendalian stabilitas ekonomi
3. pendistribusi pendapatan
4. penyediaan barang dan jasa publik yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada publik.

Explorer

Ciri-ciri organisasi sektor publik:

- dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial
- dimiliki secara kolektif oleh publik
- kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan
- keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus

Dewasa ini organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas publik.Selama ini, organisasi sektor publik dianggap kurang ekonomis, kurang efisien, efektif dan kurang transparan.Oleh karena itu, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih ekonomis,efisien,efektif,transparan dan akuntabilitas.Tuntutan untuk berakuntabilitas,bertransparansi dan konsep *value for money* menyebabkan organisasi sektor publik berusaha mengembangkan akuntansi sektor publik,khususnya pemerintah.Konsep *value for money* didasarkan pada tiga elemen utama.

Konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E.

1. Ekonomi
2. Efisiensi
3. Efektivitas

msn Explorer

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money.* Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Karena efisiensi diukur dengan mernbandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output datam proporsi *yang* lebih *besar* daripada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
4. Menurunkan input datam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

msn Explorer

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektívitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang tetah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi metebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali Iebih besar atau bahkan tiga kali Iebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996).

msn Explorer

PERTEMUAN II

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

1. **Dilihat dari tujuannya**

   organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Per-bedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta ter-dapat semangat untuk memaksimumkan laba *(profit motive),* sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik *(public service),* seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

2. **Sumber Pembiayaan**

   Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, *charging for services,* laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan Lain-Lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak.

msn Explorer

3. Pola Pertanggungjawaban

Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat *(publicfunds).* Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal *(vertical accountability)* adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban hori-sontal *(horizontal accountability)* adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akun-tabilitas publik.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional *(crossfuncuional),* dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Struktur organisasi sangat erat hubungannya dengan fungsi, strategi, dan tujuan organisasi.

msn Explorer

Persamaan organisasi sektor publik dan swasta

- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem perekonomian nasional
- menggunakan sumberdaya manusia, finansial, dan modal yang terbatas untuk mencapai tujuannya
- mempunyai pola manajemen keuangan yang dimulai dari perencanaan, sampai pengendalian dan membutuhkan akuntansi
- output produk yang sama.

msn Explorer

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

- Perkembangan paradigma kepemerintahan, diberbagai negara yang bergeser dan berproses dari *reinveting government*, menuju ke arah *governance* dan penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, secara transparan dan berakuntabilitas.
- Tahun 1950-1990an, diperlakukan sebagai sektoral ekonomi. Perlakuan ini berakibat fokus manajerial yang tidak pada penataan organisasi sektor publik, namun lebih pada penataan arus program dan anggaran. Konsep ini berhasil diterapkan dalam dua dekade pertama pemerintahan Orde Baru, dimana pendapatan Negara berlimpah dari hasil sumber daya minyak.

msn Explorer

PERTEMUAN III
REGULASI KEUANGAN DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Perkembangan dan Regulasi Akuntansi Sektor Publik

Paradigma baru dalam "Reformasi Manajemen Sektor Publik" adalah penerapan akuntansi dalam praktik Pemerintah guna mewujudkan *good governance.*

Landasan hukum pelaksanaan reformasi tersebut telah disiapkan oleh pemerintah dalam suatu Undang-undang (UU) Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas:

- UU Keuangan Negara,
- UU Perbendaharaan Negara, dan
- UU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang sekarang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

msn Explorer

Regulasi yang mengatur tentang peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dimana,Regulasi Akuntansi Sektor Publik didasarkan pada:

Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3851).

UU RI No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Sebagai landasan hukum untuk pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diberlakukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara.

msn Explorer

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud (Sugijanto, dkk.: 1995). Hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara.

Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, GBHN, dan UU APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan *(agent of development).*

Kewajiban negara:

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- memajukan kesejahteraan umum
- mencerdaskan kehidupan bangsa
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

msn Explorer

Hak-hak negara:

hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang
hak menetapkan dan memungut pajak
hak memungut bea dan cukai
hak memungut penerimaan negara bukan pajak
hak mengadakan pinjaman
hak mengadakan pinjaman paksa
hak memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, dimana dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh penerimaan negara

Pelaksanaan kewajiban atau tugas-tugas pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam UUD 1945 Amandemen LV, yang secara khusus mengatur mengenai hal Keuangan Negara, dinyatakan pada BAB VIII Pasal 23 bahwa:

msn Explorer

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang: Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan negara didasarkan pada undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang - -undang. Hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

msn Explorer

PERTEMUAN IV

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Rencana Penerimaan

- Rencana Penerimaan Rutin
- Rencana Penerimaan Luar Negeri (Penerimaan Pembangunan)

Rencana Pengeluaran

- Rencana Pengeluaran Rutin
- Rencana Pengeluaran Pembangunan

msn Explorer

Daur Anggaran Negara

Penyusunan dan pengajuan Rancangan Anggaran (RUU-APBN) oleh Pemerintah kepada DPR. Berdasarkan UUD 1945 pasal 23, tiap tahun APBN ditetapkan dengan undang-undang.Yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran adalah kekuasaan eksekutif, yang menyusun RAPBN adalah Pemerintah.

Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-APBN dan penetapan UU APBN. RUU APBN beserta Nota Keuangan (dengan perinciannya) diserahkan ke DPR untuk meminta persetujuannya agar RUU APBN tersebut disahkan menjadi UU APBN. Sebelum tahun anggaran baru dimulai, Pemerintah menyampaikan RUU-APBN, Nota Keuangan, dan Perincian Lebih Lanjut kepada DPR. Jika DPR menyetujui RUU-APBN tersebut, maka RUU tersebut disahkan menjadi UU. Sebaliknya jika tidak disetujui, digunakan UU-APBN tahun lalu (pasal 23 ayat (l) UUD1945).Rancangan Undang-undang APBN beserta nota keuangannya disampaikan Presiden kepada DPR dan dibahas dalam rapat paripurna

msn Explorer

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu Anggaran Daerah. Kedua definisi APBD di atas menunjukkan bahwa suatu Anggaran Daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

msn Explorer

UU RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam tiga Paket UU Bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja.
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.
3. Pemberdayaan manajer profesional.
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri, serta penghindaran terhadap terjadinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaaan.

msn Explorer

UU RI No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan negara tersebut dilaksanakan oleh BPK, yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD.

msn Explorer

PERTEMUAN V
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kerangka Konseptual Menurut *International Public Sector Accounting Standard*

- Kebijakan Akuntansi (*Accounting Policies*)
- Kemampuan Melanjutkan Usahanya (*Going Concern*)
- Konsistensi
- Materialitas dan kesatuan (*materiality and aggregation*)
- Penyeimbangan (*Offseting*)
- Informasi Perbandingan (*Comparative Informatin*)

msn Explorer

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (*Quality Characteristics of Financial Reporting*)

Dapat dipahami

Relevan

Materialitas

Keandalan

Kendali Informasi yang Relevan dan Andal

Tepat Waktu

Penyajian wajar

msn Explorer

Kerangka Konseptual Menurut Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP No.24 Tahun 2005)

Asumsi Dasar

1. Kemandirian entitas

   pelaporan dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiba

   untuk menyajikan laporan keuangan entitas,dan berwenang menyusun anggaran,bertanggungjawab mengelola aset dan sumber daya.
2. Kesinambungan Entitas, laporan keuangan dibuat dengan asumsi akan berlanjut keberadaannya.
3. Kerterukuran dalam satuan ang, laporan keuangan menyajikan setiap kegiatan yang dinilai dengan satuan uang.

msn Explorer

Basis Anggaran dan Basis Akuntansi

- Anggaran pernerintahan disusun dengan basis kas. Akuntansi pernerintah pada dasarnya rnerupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sarna dengan basis anggaran. Pada saat ini Pemerintahan Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran rnaupun akuntansinya.
- Apabila ada pemerintahan daerah yang menerapkan basis akrual penuh dalam sistem akuntansinya, terrnasuk untuk pendapatan dan belanja, maka penyusunan LRA, laporan yang dihasilkan dari basis akrual tersebut harus dikonversi ke LRA berbasis kas. Konversi dari LRA berbasis akrual ke LRA wajib disajikan dan diungkapkan dalam eatatan atas laporan keuangan sebagairnana diatur dalam PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan.

msn Explorer

PERTEMUAN VI
STANDARD AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Standar akuntansi Sektor Publik Menurut *InternationalPublic Sector Accounting Standard* (IPSASS)

A. IPSAS 1: *Presentation of Financial Statement* (Penyajian Laporan Keuangan)

Tujuan secara umum

- **Memberikan informasi yang bermanfaat**
- **Memenuhi kebutuhan pemakai**

Tujuan secara khusus

- **Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum**
- **Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah dapat persetujuan DPRD**
- **Menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan**
- **Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas**

- Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan kewajibannya
- Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahannya organisasi sektor public
- Menyediakan informasi untuk mengevaluasi performansi organisasi sektor public terutama yang terkait dengan biaya operasi efisiensi dan pencapaian target.

Pemakai laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut :

- Legislatif dan manajemen sektor publik
- masyarakat
- Investor dan kreditur
- Institusi internasional
- Pengamat
- Aparat sektor publik

msn Explorer

Laporan keuangan sektor publik

Didalam *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS), komponen pelaporan keuangan sebagai berikut :

- Laporan posisi keuangan
- Laporan kinerja keuangan
- Laporan perubahan aktiva neto/Ekuitas
- Laporan arus kas
- Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan
- Laporan posisi keuangan dapat dinamakan sebagai neraca atau laporan aktiva dan kewajiban.

Laporan kinerja keuangan dapat berbentuk antara lain :

- laporan pendapatan dan biaya,
- laporan laba rugi,
- laporan operasi,
- laporan surplus atau defisit atau
- laporan keuntungan atau kerugian.

msn Explorer

Bagi entitas nirlaba, catatan atas laporan kinerja keuangan berupa, antara lain :

Laporan pencapaian sasaran, dan target

Realisasi versus angggaran dan Kinerja non keuangan

Dalam perkembangannya, kompromi antar IPSAS, SAKP-BAKUN dan PP 105/2000 telah membawa kepenambahan komponen laporan keuangan, yaitu perhitungan anggaran.

msn Explorer

PERTEMUAN VII

B. IPSAS 2 : *Cash Flow Statement* (Laporan Arus Kas)

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/ kas daerah selama periode tertentu.

C. I PSAS 3: *Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies* (Surplus atau Defisit Bersih untuk Periode Berjalan, Analisis Kesalahan, dan Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi)

D. IPSAS 4: *The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates* (Pengaruh Perubahan dalam Tingkat Pertukaran Asing)

E. IPSAS 5: *Borrowing Costs* (Biaya Peminjaman)

F. IPSAS 6: *Consolidated Financial Statement and Accounting for Controlled Entities* (Laporan Keuangan Konsolidasi dan Akuntansi untuk Entitas yang Dikendalikan)

G. IPSAS *7: Accounting for Investments in Associates* (Akuntansi untuk investasi dalam Asosiasi)

H. IPSAS 8: *Financial Reporting of Interest in Joint Ventures* (Laporan Keuangan atas Kepentingan dalam Usaha Bersama)

msn Explorer

I. IPSAS *9: Revenue form Exchange* (Pendapatan dari Pertukaran)

J. IPSAS 10: *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies* (PelaporanKeuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi)

K. IPSAS 11: *Construction Contract* (Kontrak Konstruksi)

L. IPSAS *12: Inventories* (Persediaan)

M. IPSAS 13: Leases

N. IPSAS 14: *Events After* ***the Reporting Date*** (Kejadian sesudah Tanggal Pelaporan)

O. IPSAS 15: *Financial Instruments: Disclosure and Presentation* (Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian)

P.IPSAS 16: *Investment Property* (Investasi Properti)

Q. IPSAS 17 *Property, Plant, and Equipment* (Properti, Pabrik, dan Peralatan)

R. IPSAS 18: *Segment Reporting* (Pelaporan Segmen)

O. IPSAS 19: *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* (Pencadangan, Kewajiban Tidak Pasti, dan Aktiva Tidak Pasti)

P. IPSAS 20: *Related Party Disclosures* (Pengungkapan yang Berhubungandengan Pihak Ketiga)

Q. IPSAS 21: *Impairment of Non Cash Generation Assets* (Penurunan Nilai Aktiva yang Menghasilkan Non Kas)

msn Explorer

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MENURUT *GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD* (GASB) *STATEMENT 34*

GASB *Statement* 34 mengatur pelaporan keuangan untuk pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan tahunan secara lengkap *(comprehensive annual financial report/CAFR),* laporan keuangan dasar, dan informasi tambahan yang diharuskan *(required supplementary* information/RSI).

1. **Laporan Keuangan Lengkap**
2. **Laporan Keuangan Dasar dan Informasi Tambahan**

msn Explorer

PERTEMUAN VIII

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran adalah produk atau hasil dari penyusunan anggaran. Penganggaran adalah keseluruhan proses sejak penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya.

Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

- Berapa biaya rencana pengeluaran/belanja
- Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).
- Tujuan dan jangka waktu, untuk kepentingan operasi keuangan yang berjangka pendek satu tahun atau kurang.

Alasan pentingnya anggaran sektor publik:

- Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yg tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya terbatas.
- Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat (sbg instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga2 publik)

msn Explorer

Fungsi Anggaran Sektor Publik

- Alat Perencanaan
- Alat pengendalian
- Alat kebijakan fiskal dan politik
- Alat koordinasi dan komunikasi
- Alat motivasi dan penilaian kinerja

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Ada beberapa jenis anggaran yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan keadaannya yaitu :

- Anggaran Konvensional
- Anggaran Kinerja *(Performance Budget)*
- *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*
- *Zero Based Budgeting (ZBB)*

msn Explorer

1. Anggaran konvensional

Merupakan jenis anggaran yang paling sederhana, dilandasi pola pikir, kemana sumber-sumber pendapatan yang tersedia itu digunakan atau berorientasi pada obyek pengeluaran, sehingga dalam operasinya menekankan pada prosedur formal dan pertanggung jawaban atas setiap pelaksanaan anggaran, yang berarti pula peranan dan fungsi pengawasan sangat penting.

2. Anggaran Kinerja

Anggaran kinerja timbul sebagai respon atas kekurangpuasan terhadap anggaran konvensioanl karena sistem konvensional hanya berorientasi pada obyek pengeluaran, sehingga apa yang telah dihasilkan oleh pemerintah sulit dilakukan pengukuran atau penilaian kinerjanya.

3. *Planning-Programming- Budgeting System (PPBS)*

Praktik anggaran kinerja terus berkembang dan diperlukan perencanaan jangka panjang serta penyusunan program dan pembuatan anggaran tahunan secara menyeluruh dan terpadu.

4. *Zero Based Budgeting*

Adalah proses perencanaan dan penganggaran yang menghendaki setiap manajer memberikan alasan bagi seluruh usulan anggarannya secara terinci sejak awal dengan mengalihkan kewajiban beban pembuktiannya kepada setiap manajer untuk mengemukakan alasan mengapa harus mengeluarkan biaya.

msn Explorer

PERTEMUAN IX

Anggaran Daerah di Indonesia

Anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemrintah daerah dalam uang,atau jasa pada tahun anggaran.Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagai mana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur Penyusunan APBD

Tahap Perencanaan

- Rencana Jangka Panjang (lima tahunan)
- Rencana Jangka Menengah (tiga tahunan)
- Rencana Jangka Pendek (satu tahunan)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dilakukan sebelum menyiapkan rancangan APBD,pedoman dalam penyusunan APBD.

msn Explorer

Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

A. **Pengertian dan ruang lingkup**

- **Strategi untuk mencapai suatu target kinerja melalui hubungan yang efektif antara sumber daya manusia,teknologi dan lingkungannya,karakteristik strategi: 1. Pendekatan atau metode untuk mencapai arah dan kebijakan umum yang ditetapkan. 2.Dimaksudkan untuk mengahadapi perubahan lingkungan. 3. Diarahkan menuju pada kondisi yang lebih menguntungkan.**
- **Prioritas merupakan suatu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain.**

B. Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

- Berdasarkan kebijakan umum APBD, pemerintah daerah melalui tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan prioritas APBD.
- Tim penyusun anggaran eksekutif dalam mengembangkan strategi dan prioritas APBD dapat melibatkan tim ahli.

msn Explorer

Tahap Penyusunan Rancangan APBD

1. **Penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja**

   Pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum APBD berpedoman pada renstrada,penjaringan aspirasi masyarakat,laporan kinerja tahun anggaran sebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD,dan kebijakan keuangan daerah.Penjaringan masyarakat dimulai bulan Mei dan kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD mengenai KUA dilaksanakan bulan Juni dan Juli. Berdasarkan KUA, pemerintah daeran menyusun strategi dan prioritas APBD.

2. **Penyusunan Rancangan APBD**

   RASK memuat rancangan anggaran masing-masing unit kerja dan disampaikan kepada tim anggaran eksekutif untuk dievaluasi. Jika hasil evaluasi tersebut telah dinyatakan benar dan sesuai dengan kebijakan umum APBD,strategi dan prioritas APBD serta standar biaya, maka berdasarkan RASK masing-masing unit kerja tersebut dibuat menjadi RAPBD.Rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran-lampiranya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

msn Explorer

Struktur APBD

Rencana Penerimaan Daerah

- Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
- Secara umum pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Perimbangan
- Lain-iain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana pengeluaran Daerah

Anggaran belanja daerah juga dibagi ke dalam dua kelompok rencana pengeluaran yaitu:

a.pengeluaran rutin

b.rencana pengeluaran pembangunan

msn Explorer

PERTEMUAN X

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan tersebut disiapkan oleh PPK SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk enem bulan berikutnya, paling lama 7 (tujuh)

PPKD menggabungkan seluruh LRSP SKPD paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran bersangkutan dan disampaikan kepada sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan SKPD (Laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.Kemudian PPKD menyusun laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan) pemerintah daerah dengan menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir

msn Explorer

SIKLUS AKUNTANSI

Siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada datam sistem akuntansi. Tahap-tahap yang ada dalam sikius akuntansi tersebut adalah (Sugiri:2001, hal. 13):

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam *Bukti* dan rnelakukan *Analisis Transaksi* keuangan tersebut.
2. Mericatat transaksi keuangan datam *Buku Jurnal.* Tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas, dalam *Buku Besar,* transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut postfng atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam *Neraca Saldo.*
5. Menyesuaikan buku besar berdasarkari inforrnasi yang paling *up-to-date* (mutakhir).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam *Neraca Saldo Setelah Penyesuaian* (NSSP).
7. Menyusun *Laporan Keuangan* berdasarkan NSSP
8. *Menutup* buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam *Neraca Saldo Setelah Tutup Buku.*

msn Explorer

Sistem (tata buku) berpasangan

Akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan *(double entry system).* Misalnya PEMDA mengeluarkan kas untuk membayar sewa garasi. Terhadap transaksi ini, akuntansj mencatat tidak hanya “pengeluaran kasnya, tetapi juga ‘untuk apa” kas itu dikeluarkan. Analisis transaksi juga tunduk pada sistem berpasangan tersebut. Untuk memahami analisis transaksi demikian, kita akan menggunakan alat bantu ‘persamaan dasar akuntansi.

msn Explorer

PERTEMUAN XI

Akuntansi Kas dan Bank

Jurnal untuk mencatat gaji dan tunjangan dengan bukti SPM No.1 tanggal 9 september 2006, adalah :

Beban gaji pokok	Rp. 10.000.000	
Tunjangan Keluarga	Rp. 2.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp. 2.000.000	
Tunjangan Beras	Rp. 1.000.000	
Kas		Rp. 15.000.000

Akuntansi Piutang

- Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang pajak dengan bukti STS No.4, pada tanggal 29 september 2006,adalah:
- Kas Rp. 45.000.000
- Piutang Pajak daerah Rp. 25.000.000
- Piutang Restribusi Daerah Rp. 20.000.000

msn Explorer

Akuntansi AktivaTetap

Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap:

Tanah.	Rp	xxx		
Peralatan & Mesin.			Rp	xxx
Gedung & Bangunari.			Rp	xxx
Jalan, Irigasi, Jaringan.			Rp	xxx
Aset Tetap lainnya.			Rp	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan.			Rp	xxx
Diinvestasikan dalam aset tetap.			Rp	xxx

Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

msn Explorer

Kontrak kontruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi,fungsi atau tujuan dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya kontruksi jaringan irigasi.Kontrak kontruksi dapat meliputi 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan kontruksi aset,seperti jasa arsitektur,2) kontrak untuk perolehan atau kontruksi aset,3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan kontruksi aset yang meliputi manajemen kontruksi dan *value engineering*, dan 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Akuntansi Investasi

Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Alasan melakukan investasi:

a. Memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan jangka panjang.
b. Memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka panjang.

msn Explorer

Akuntansi Kewajiban

Terhadap barang jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah mengakui kewajiban itu sebagai utang dineraca.

Contoh:

- Kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah. Kontraktor itu sudah menyelesaikan porsi pekerjaan tahap 1 dan telah menyerahkan kepada pemerintah. Jumlah tagihan termin 1 tersebut sampai akhir tahun belum dibayar. Oleh karena itu, jumlah itu merupakan utang yang harus disajikan di neraca.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalarn waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Contoh:

- Pinjaman obligasi yangjatuh tempo tahun yang akan datang sebesar Rp 1.000.000.000 disajikan sebesar nilai nominal.

msn Explorer

PERTEMUAN XII

Perubahan Valuta Asing

- Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut dengan kurs spot *(spot rate).*

Restrukturisasi Utang

- Dalam restrukturisasi utang melalui rnodifikasi persyaratan utang, debitur harus rnencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi keeuali jika nilai tercatat itu rnelebihi jumlah pernbayaran kas rnasa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Penghapusan Utang

- Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

msn Explorer

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar diakui pada saat pengakuan seluruh aktiva lancar kecuali donasi dan seluruh utang lancar. Ekuitas Dana Diinvestasikan diakui pada saat seluruh investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain (kecuali donasi dan dana cadangan), dan utang jangka panjang diakui. Ekuitas Dana Dicadangkan diakui pada saat penentuan penyisihan dana cadangan pada neraca. Ekuitas Dana Donasi diakui pada saat diterimanya sumbangan, bantuan, hibah, dan swadana dari masyarakat.

Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

Tujuan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa yaitu meningkatkan relevansi, keandalan dan daya banding Laporan Keuangan suatu perusahaan atau entitas dan mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

msn Explorer

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

msn Explorer

PERTEMUAN XIII
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMEN-ELEMENYA

Penyajian Laporan Keuangan

Hal-hal yang Harus Diperhatikan sebagai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun dengan basis kas untuk pendapatan dan biaya, transfer, dan pembiayaan. Basis akrual untuk pengakuan aset dan ekuitas dana. Pernyataan tersebut berlaku untuk entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk untuk perusahaan negara dan BUMN.
2. Entitas pelaporan dalam pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan daj,at juga sepenuhnya menggunakan basis akrual tetapi tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas.
3. Tujuan umum laporan keuangan:

   Menunjukkan posisi keuangan.

   Menunjukkan arus kas.

   Menunjukkan kinerja keuangan.

   Tujuan spesifik laporan keuangan:

   Menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan.

   Menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sebagai pertanggungjawaban.

msn Explorer

4. Tanggung jawab pelaporan ini ada pada pimpinan entitas.

5. Definisi ataupun istilah-istilah yang digunakan:

- Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksahakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang sistematis.
- Entitas Akuntansi:
- Unit pemerintahan pengguna anggaran atau barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- Entitas Pelaporan:
- Unit pemerintahan yang terdiri dari satu/lebih entitas akuntansi menurut UU wajib menyampaikan laporan keuangan.

6. Tujuan Umum Laporan Keuangan.

- Tujuan umum laporan keuangan: menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang

msn Explorer

Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah: untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya ekonomi.

Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggarannya.

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

7. Komponen yang terdapat dalam 1 set laporan keuangan:

- Laporan realisasi anggaran.
- Neraca.
- Arus kas.
- Catatan atas laporan keuangan

msn Explorer

Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual:

- Pada saat pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Basis kas: saat terbitnya SKP tersebut belum diakui sebagai pendapatan.
- Basis akrual : terbitnya SKP tersebut sudah diakui sebagai pendapatan.

Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang--kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan.
2. Belanja.
3. Transfer.
4. Surplus / defisit.
5. Pembiayaan.
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

msn Explorer

PERTEMUAN XIV

Laporan Arus Kas

- LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/ kas daerah selama periode tertentu.
- Isi LAK yaitu menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah
- (PFK).
- LAK disajikan dengan mengelompokkan berdasarkan aktivitas yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, aktivitacs pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan

- Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang menurut UU wajib menyarnpaikan laporan pertangungjawaban berupa laporan keuangan

msn Explorer

Tujuan pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan

1. Agar laporan keuangan dapat dipahami pembaca secara luas.
2. Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca laporan keu.

Isi Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan (meliputi kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan), ekonomi makro (misalnya tingkat inflasi dan nilai tukar), pencapaian target UU APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi.
2. Ikhtisar peneapaian kinerja keuangan yang merupakan indikator peneapaian kinerja kegiatan operasional.
3. Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih pada transaksi yang penting.
4. Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi basis kas.
6. Informasi tambahan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

msn Explorer